



Oleh: OLEH: AGUNG WIBAWA<sup>1</sup>  
Email: [nikolae.wibawa@gmail.com](mailto:nikolae.wibawa@gmail.com)

# Membangun Citra Profesi Pustakawan di Masyarakat

## Abstrak

Perpustakaan dalam perkembangannya menjadi sebuah institusi yang tidak hanya melayani pustaka tetapi lebih kepada melayani informasi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat pemustakanya. Berbagai permasalahan hidup dapat terselesaikan di perpustakaan, menjadi harapan bagi pemustaka sehingga institusi perpustakaan benar-benar menjadi primadona yang diminati masyarakat. Seiring dengan itu profesi pustakawan pun turut sejalan dengan organisasi induknya dan lebih dihargai sebagai organisasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemberdayaan dan peningkatan citra pustakawan harus dimulai dengan peningkatan *self-esteem* dan *self-respect* terhadap profesinya. Menemukan berbagai permasalahan dalam organisasi dan masyarakat, internal dan eksternal, kegiatan inovatif dilakukan dalam rangka profesionalitas pustakawan di dalam masyarakat, diantaranya dengan diversifikasi kegiatan pustakawan melalui Institusi dan IPI serta beberapa kegiatan tidak biasa tetapi berdampak positif. Kegiatan ini diharapkan menemukan solusi dalam mengkonsistensikan profesi pustakawan dan perpustakaan.

**Kata Kunci:** *Citra profesi, Diversifikasi usaha, Positive deviance, Pustakawan, Self-esteem*

## Pendahuluan

Pengertian perpustakaan secara tradisional adalah mencakup suatu ruangan, bagian dari gedung/bangunan atau gedung tersendiri yang berisi koleksi, diatur dan disusun sedemikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca (Sutarno, 2006:11). Sedangkan menurut Lasa (2007:12) perpustakaan adalah kumpulan atau bangunan fisik sebagai tempat buku dikumpulkan dan disusun menurut sistem tertentu atau keperluan pemakai. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan secara tegas keprofesionalan dalam mengelola perpustakaan.

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan

rekreasi pemustaka. Perubahan paradigma perpustakaan dari tradisional ke modern menjadi keniscayaan pada era informasi dan teknologi sekarang ini.

Perpustakaan yang tanpa batas dan memiliki koleksi digital dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Crawford dan Gorman seperti dikutip oleh Awcock (1996), menyatakan bahwa perpustakaan masa kini bahkan masa depan memiliki lima prinsip sebagai berikut:

1. *Libraries serve humanity* (perpustakaan melayani manusia);
2. *Respects all form by which knowledge is communicated* (suatu kehormatan semua bentuk pengetahuan dikomunikasikan);
3. *Use the technology intelligently to enhance service* (gunakan teknologi dengan cerdas untuk

<sup>1</sup> Pemenang Peringkat Pertama Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2016. Pustakawan Ahli Muda pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta.

- meningkatkan pelayanan);
- 4. *Protect free access to knowledge* (lindungi akses gratis pengetahuan); dan
- 5. *Honor the past and create future* (menghormati masa lalu dan menciptakan masa depan).

Pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan pustakawan, maka peran pustakawan semakin kompleks dan penting. Pustakawan tidak sekedar sebagai penjaga perpustakaan yang bertugas meminjamkan dan mengembalikan buku tetapi lebih profesional dan personal dalam mengelola dan melayani informasi disebut sebagai *broker information*. Semua itu menjadi tantangan pustakawan dan perpustakaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pemustaka secara cepat, tepat, dan relevan. Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan kompetensi individual dan profesional pustakawan, sehingga perpustakaan tidak ditinggalkan pemustakanya dan pustakawan tidak sekedar menjadi penjaga gedung. Di dalam masyarakat sendiri banyak yang memandang rendah keberadaan perpustakaan yang berdampak pada tidak populernya profesi pustakawan. Bahkan ada kecenderungan yang menganggap pustakawan adalah petugas perpustakaan/guru, staf, maupun penjaga sekolah, siapapun itu yang menjaga layanan perpustakaan. Tentu saja stigma ini merugikan profesi pustakawan yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun non formal dan memiliki sikap pengembangan diri, mau menerima dan melaksanakan hal-hal baru dengan jalan memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia (Lasa, 2009:296).

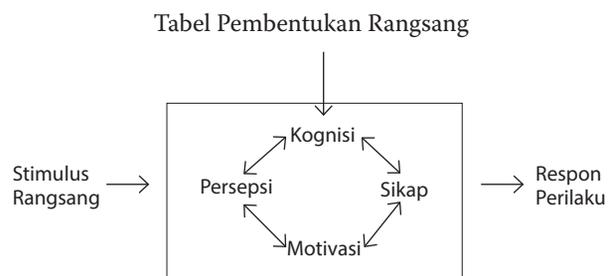
Perubahan stigma di masyarakat tentang profesi pustakawan sangat diperlukan. Perubahan tersebut tidak dapat dilakukan secara mendadak tetapi harus intensif dan berkelanjutan. Perubahan tersebut dimulai dari perpustakaan dan pustakawan itu sendiri. Bagaimana meningkatkan citra pustakawan yang tidak bisa terlepas dari upaya meningkatkan dan memberdayakan perpustakaan baik dalam dunia pendidikan maupun masyarakat secara masif. Berbagai upaya dilakukan pustakawan untuk membangun *image* pustakawan sebagai profesi yang penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenyataannya sampai saat ini penghargaan masyarakat terhadap profesi masyarakat masih juga

rendah. Untuk itu dibutuhkan usaha yang luar biasa bahkan menyimpang (*deviance*) untuk meningkatkan citra diri pustakawan, khususnya di masyarakat.

**Definisi Citra**

*Cambridge Advanced Learner's Dictionary third edition, image* atau citra didefinisikan sebagai *the picture in your mind or an idea of how someone or something is* yaitu suatu gambaran yang ada di dalam benak seseorang atau ide tentang bagaimana seseorang itu atau sesuatu itu. Bill Canton seperti yang disitir dalam buku *Dasar-dasar Public Relations* mendefinisikan citra sebagai kesan, perasaan, gambaran dari publik terhadap perusahaan; kesan yang sengaja diciptakan oleh suatu objek, orang atau organisasi (Soemirat dan Alvinaro Ardianto, 2010: 111). Menurut Lasa dalam Kamus Kepustakawanan Indonesia, citra adalah sesuatu yang tampak oleh indra tetapi tidak memiliki eksistensi substansial (Lasa, 2009:59). Secara sederhana citra diri seorang pustakawan dapat diartikan sebagai gambaran kita terhadap diri kita atau pikiran kita tentang pandangan orang lain terhadap diri kita.

Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi yang diterima oleh seseorang (Soemirat dan Alvinaro Ardianto, 2010:114). Informasi yang diterima berkaitan dengan pustakawan baik yang dikomunikasikan secara langsung maupun tidak, akan menimbulkan perilaku tertentu dan cenderung mempengaruhi cara seseorang dalam melihat citra pustakawan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh John S. Nimpoeno, bahwa proses pembentukan citra terbentuk melalui pengalaman atau stimulus yang berasal dari luar diorganisasikan dan mempengaruhi respon. (Soemirat dan Alvinaro Ardianto, 2010: 115).



Sumber: Soemirat dan Alvinaro Ardianto, 2010: 115

Empat komponen: persepsi, kognisi, sikap, dan motivasi diartikan sebagai citra individu terhadap rangsang. Individu akan memberikan makna terhadap

rangsang berdasarkan pengalamannya mengenai pustakawan. Kemampuan mempersepsi itulah yang kemudian melanjutkan sebagai proses pembentukan citra atau pencitraan. Kata pencitraan lebih sering dikaitkan dengan *Personal Branding* yang dilakukan untuk mengangkat namanya agar banyak dikenal di masyarakat. Hal ini sering dilakukan oleh seseorang yang berusaha mengenalkan dirinya kepada khalayak, kemudian ditangkap secara positif oleh lingkungan atau komunitas.

Beberapa definisi mengenai *personal branding* diantaranya menurut Montoya (2006), *personal branding* adalah sebuah seni dalam menarik dan memelihara lebih banyak *klien* dengan cara membentuk persepsi publik secara aktif. Pengertian lainnya *personal branding* adalah sesuatu tentang bagaimana mengambil kendali atas penilaian orang lain terhadap anda sebelum ada pertemuan langsung dengan anda. (Montoya & Vandehey, 2008). Selain itu *personal branding* dimaknai sebagai kemampuan menggunakan atribut secara bebas yang menunjukkan kemampuan anda dalam mengatur harapan yang ingin orang lain terima dalam pertemuannya dengan anda (Mobray, 2009). Dapat disimpulkan bahwa pencitraan diri atau *personal branding* adalah suatu proses dalam membentuk persepsi masyarakat atas diri manusia seperti yang diharapkan, yang membedakan dengan manusia lainnya.

Terdapat 8 konsep utama acuan dalam membangun suatu *personal branding* seseorang (Peter Montoya, 2002), jika diterapkan pada pustakawan adalah sebagai berikut:

1. Spesialisasi (*The Law of Specialization*);

Ciri khas dari sebuah *Personal Brand* adalah ketepatan pada sebuah spesialisasi, terkonsentrasi hanya pada sebuah kekuatan, keahlian atau pencapaian tertentu. Spesialisasi dapat dilakukan pada satu atau beberapa cara, yaitu:

- a. *Ability* - visi yang strategis dan prinsip-prinsip awal yang baik.
- b. *Behavior* - keterampilan dalam memimpin, keder-mawanan, atau kemampuan untuk mendengar-kan.
- c. *Lifestyle* - membaca sebagai gaya hidup.
- d. *Mission* - melihat orang lain melebihi persepsi mereka sendiri.
- e. *Product* - menciptakan suatu perpustakaan yang menarik.
- f. *Profession-niche within niche*- pelatih kepemim-

pinan yang juga seorang psikoterapi.

g. *Service* - pustakawan yang bekerja sebagai seorang pencerita.

2. Kepemimpinan (*The Law of Leadership*);

Masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang dapat memutuskan suatu ketidakpastian dan memberikan suatu arahan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan mereka. *Personal Brand* yang dilengkapi dengan kekuasaan dan kredibilitas mampu memposisikan seseorang sebagai pemimpin yang terbentuk dari kesempurnaan seseorang.

3. Kepribadian (*The Law of Personality*);

Sebuah *Personal Brand* yang hebat harus didasarkan pada sosok kepribadian yang apa adanya, dan hadir dengan segala ketidaksempurnaannya. Konsep ini menghapuskan beberapa tekanan yang ada pada konsep Kepemimpinan (*The Law of Leadership*), seseorang harus memiliki kepribadian yang baik, tidak harus menjadi sempurna.

4. Perbedaan (*The Law of Distinctiveness*);

*Personal Brand* yang efektif perlu ditampilkan dengan cara berbeda dengan yang lainnya. Banyak pustakawan membangun *image* dengan konsep yang standar, apa adanya atau sama dengan kebanyakan *image* yang ada di sebuah profesi layanan, dengan tujuan untuk menghindari konflik. Namun hal ini justru merupakan suatu kesalahan, karena pustakawan tidak dikenal diantara sekian banyak profesi yang ada di masyarakat.

5. *The Law of Visibility*;

Untuk menjadi sukses, *Personal Brand* harus dapat dilihat secara konsisten terus-menerus, sampai *Personal Brand* seseorang dikenal. Maka *visibility* lebih penting dari kemampuan (*ability*)-nya. Untuk menjadi *visible*, pustakawan perlu mempromosikan dirinya, memasarkan dirinya, menggunakan setiap kesempatan yang ditemui dan memiliki beberapa keberuntungan.

6. Kesatuan (*The Law of Unity*);

Kehidupan pribadi seseorang dibalik *Personal Brand* harus sejalan dengan etika moral dan sikap yang telah ditentukan dari merek tersebut. Kehidupan pribadi selayaknya menjadi cermin dari sebuah citra yang

ditanamkan dalam *Personal Brand*.

7. Keteguhan (*The Law of Persistence*);  
Setiap *Personal Brand* membutuhkan waktu untuk tumbuh, selama proses tersebut berjalan, penting untuk selalu memperhatikan setiap tahapan dan *trend*. Dapat pula dimodifikasikan dengan iklan atau *public relation*. Pustakawan harus tetap teguh pada *Personal Brand* awal yang telah dibentuk, tanpa ragu dan berniat merubahnya.
8. Nama baik (*The Law of Goodwill*)  
*Personal Brand* memberikan hasil yang lebih baik dan bertahan lama, jika seseorang dibelakangnya dipersepsikan dengan cara positif. Seseorang tersebut harus diasosiasikan dengan sebuah nilai atau ide yang diakui secara umum positif dan bermanfaat.

### Profesi Pustakawan

Istilah profesi berasal dari kata *profess* yang berarti 'pengakuan', kata *profess* atau profesi digunakan pada abad pertengahan, di Eropa Barat, Jerman, dan di Skandinavia dengan istilah *Gilda*, perkumpulan orang memiliki keterampilan khusus, seperti tukang sepatu, tukang kayu, dan tukang pandai besi. Keterampilan khusus berkembang menjadi spesialisasi, yaitu orang yang mengkhususkan diri dalam sebuah pekerjaan khusus (Sulistyo-Basuki, 1993).

Abraham Flexner (dalam Wirawan, 1988) menyatakan bahwa profesi paling tidak memenuhi 6 persyaratan, yaitu:

1. Profesi merupakan pekerjaan intelektual, menggunakan intelegensia bebas yang diterapkan pada problem dengan tujuan untuk memahaminya dan menguasainya;
2. Profesi merupakan pekerjaan *saintifik* berdasarkan pengetahuan yang berasal dari *sains*;
3. Profesi merupakan pekerjaan praktikal, artinya bukan teori akademik tetapi dapat diterapkan dan dipraktikkan;
4. Profesi terorganisasi secara sistematis;
5. Ada standar cara melaksanakannya dan mempunyai tolok ukur hasilnya; dan
6. Profesi merupakan pekerjaan *altruisme* berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya bukan kepada diri profesionalisme, sedangkan profesionalisme menunjukkan ide, aliran, isme yang bertujuan

mengembangkan profesi, agar profesi dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu pada norma, standar dan kode etik, serta memberikan layanan terbaik kepada *klien*.

Lasa (2009) menyebutkan bahwa sebuah profesi adalah bukan sekedar pekerjaan/ *vacation*, akan tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian/*expertise*, tanggung jawab/*responsibility*, dan kesejawatan/*corporateness*. Profesi informasi (termasuk pustakawan) memerlukan variabel-variabel; pengembangan pengetahuan, penyediaan sarana/institusi, asosiasi, dan pengakuan oleh khalayak.

Pengertian pustakawan dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pengertian Pustakawan di dalam AD/ART dan Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia Periode 2015-2018 pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Lebih lanjut Lasa (2009) menyebutkan bahwa profesi pustakawan pada jaman Mesir Kuno telah diakui dan memiliki kedudukan tinggi dalam pemerintahan, mereka telah berpengetahuan tinggi dan ahli bahasa. Profesi pustakawan di Indonesia diakui secara formal sebagai tenaga fungsional berdasar SK MENPAN No. 18/MENPAN/1988 dan SK ini diperbaharui dengan SK MENPAN No. 33/1998. kemudian direvisi dan terbit SK MENPAN No. 132 Th. 2002, sebagai pelaksanaan keputusan tersebut dikeluarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 2 Th. 2008. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan tentang profesi pustakawan. Ditegaskan kembali di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 83 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan, Hiburan, dan Perorangan Lainnya Bidang Perpustakaan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Perpustakaan. Terakhir dengan dikeluarkannya peraturan yang membahas

tentang profesionalisme pustakawan yaitu Permenpan dan RB No. 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Pengembangan suatu profesi dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dibagi dalam indikator-indikator:

1. Tingkat kebutuhan masyarakat;
2. Standar keahlian;
3. Selektivitas keanggotaan;
4. Kemauan untuk berkembang;
5. Hubungan profesi dan ilmu pengetahuan;
6. Institusi;
7. Tingkat pendidikan;
8. Kode etik;
9. Pengamalan ilmu pengetahuan; dan
10. Organisasi profesi.

Orasi Pustakawan Utama, Wartini (2010) mengemukakan bahwa pengertian pustakawan, adalah: 1) kompetensi bidang ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi, 2) kompetensi diperoleh melalui pendidikan/pelatihan, 3) kompetensi digunakan untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan perpustakaan, dan 4) memberikan layanan kepada masyarakat. Keempat catatan tersebut sesuai dengan ciri-ciri profesi (Sulistyo-Basuki) yaitu: 1) adanya asosiasi atau organisasi profesi (Ikatan Pustakawan Indonesia, dan lain sebagainya), 2) adanya pola pendidikan profesi yang jelas (jurusan ilmu perpustakaan di perguruan tinggi), 3) adanya kode etik (diimplementasikan dalam ketentuan pelayanan pemustaka maupun yang ditentukan oleh IPI), 4) berorientasi pada jasa (melayani pemustaka), dan 5) adanya kemandirian (masih diragukan oleh beberapa kalangan karena fungsional pustakawan dibentuk oleh pemerintah untuk kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi/unit kerja).

### Masyarakat

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu yang berada dalam kelompok tersebut (Wikipedia). Kata *society* sendiri berasal dari bahasa Latin, *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman, sehingga arti kata *society* berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata

*society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan masyarakat adalah: 1. Sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu. 2. Segolongan orang yang mempunyai kesamaan tertentu (KBI: 934).

Jika berbicara mengenai masyarakat dalam hal ini masyarakat Indonesia, tidak terlepas dari pemahaman mengenai masyarakat yang multikultur. Secara etimologis multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Secara hakiki, kata multikulturalime terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya yang masing-masing unik (Choirul, 2006). Konsep multikulturalisme disini tidaklah dapat disamakan dengan konsep keberagaman suku bangsa atau kebudayaan yang menjadi ciri khas masyarakat majemuk (*plural society*). Karena, multikulturalisme menekankan keberagaman kebudayaan dalam kesederajatan. Multikulturalisme tidak bisa dilepaskan dari permasalahannya yang mendukung ideologi, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya, komuniti dan golongan minoritas, prinsip etika dan moral, juga tingkat dan mutu produktivitas.

Pengertian mengenai masyarakat multikultur penting untuk dimengerti oleh pustakawan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Peluang pustakawan untuk beradaptasi dengan masyarakat sangat besar karena pada dasarnya perpustakaan memiliki sifat yang multikultur. Tanpa mengerti akan akar budaya dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat, pustakawan akan kesulitan dalam mengeksistensikan keprofesionalannya. Dalam beradaptasi dengan masyarakat, pustakawan tidak sekedar hanya hidup di tengah-tengahnya tanpa memberikan kontribusi nyata tetapi memerlukan akulturasi kepustakawanan yang berkelanjutan. Konsep akulturasi ini telah lama diperkenalkan para antropolog dan sosiolog. Definisi awal akulturasi dikemukakan oleh Redfiels, dkk. dalam Purwanto (2000:104) adalah fenomena yang terjadi ketika kelompok individu yang mempunyai budaya berbeda melakukan kontak berkelanjutan yang pada akhirnya mengubah pola budaya asli dari budaya pendatang maupun budaya setempat.

Sementara itu Joyomartono (1991:41) menyampaikan bahwa akulturasi sebagai akibat kontak kebudayaan dapat terjadi dalam salah satu kebudayaan pesertanya tetapi dapat juga terjadi di dalam kedua kebudayaan yang menjadi pesertanya. Akulturasi melibatkan perbedaan tingkat pembelajaran dan mempertahankan budaya yang bergantung pada faktor individu, kelompok maupun lingkungan. Proses akulturasi bersifat dinamis sebab merupakan proses yang terus berlanjut dan berubah-ubah dan bersifat multidimensi sebab berlangsung menuju sejumlah fungsi psikososial dan dapat berhasil dalam bentuk adaptasi.

Minat baca maupun minat kepustakawanan belum menjadi budaya, masih menjadi minoritas dalam masyarakat. Data menunjukkan bahwa minat baca di Indonesia masih rendah. Merujuk dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 sebanyak 91,68% penduduk yang berusia 10 tahun keatas lebih menyukai menonton televisi, dan hanya sekitar 17,66 persen yang menyukai membaca dari berbagai sumber seperti surat kabar, buku atau majalah. Berdasar data *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada tahun 2012 indeks minat baca masyarakat Indonesia baru mencapai 0,001 yang artinya dari setiap 1.000 orang Indonesia hanya ada 1 orang saja yang memiliki minat baca serius. Dalam menumbuhkan budaya membaca di beberapa negara mewajibkan anak sekolah sebelum menamatkan pendidikannya diberi kewajiban untuk membaca buku dan menamatkannya dalam jumlah tertentu. Jerman misalnya, mewajibkan siswanya untuk menamatkan membaca buku hingga 22-23 buah. Di lingkup ASEAN, negara Malaysia dan Singapura telah menerapkan dan mewajibkan siswanya yang ingin lulus sekolah untuk menamatkan sebanyak enam buku. Malaysia dalam kajian UNDP memiliki angka melek huruf orang dewasa 86,4 persen. Sedangkan di Indonesia hanya 65,5 persen. Berdasarkan hasil penelitian yang sama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada posisi 121 dari 187 negara di dunia artinya secara umum kualitas dan kompetisi masyarakat Indonesia tertinggal dari negara lainnya.

Di sisi lain fenomena ini bisa menjadi *interest* bagi pustakawan dalam mewujudkan masyarakat yang *literate* terhadap informasi lewat perpustakaan. Masyarakat menjadi *living university* bagi pengembangan budaya baca dan pustakawan mengambil peran penting dalam

membentuknya.

### Membangun Citra Profesi Pustakawan di Masyarakat

Membangun berarti memberdayakan dan meningkatkan citra profesi pustakawan. Untuk melakukan hal tersebut perlu dilihat dari berbagai sisi yaitu internal dan eksternal.

#### Internal

Secara internal membangun citra profesi pustakawan dimulai dari diri sendiri dengan mengembangkan *self-esteem* dan *self-respect* terhadap profesi pustakawan itu sendiri. Menurut Stuart dan Sundeen (1991), harga diri (*self-esteem*) adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal dirinya. Harga diri menggambarkan sejauhmana individu tersebut menilai dirinya sebagai orang yang memiliki kemampuan, keberartian, berharga, dan kompeten. Sedangkan Gilmore mengemukakan bahwa: “...*self-esteem is a personal judgement of worthiness that is a personal that is expressed in attitude the individual holds toward himself*. Pendapat ini menerangkan bahwa harga diri merupakan penilaian individu terhadap kehormatan dirinya, yang diekspresikan melalui sikap terhadap dirinya. Sementara itu, Santrock (2011) memberikan pengertian *harga diri (self-esteem)* sebagai harga diri atau penghargaan seseorang terhadap diri sendiri termasuk *self-respect*, rasa percaya diri dan segala kemampuan yang ada pada dirinya sendiri atau keseluruhan cara yang digunakan untuk mengevaluasi diri. Dalam meningkatkan *self-esteem* atau penghargaan terhadap diri sendiri ada beberapa cara yang dilakukan diantaranya:

- a. Membantah *inner critic* atau suara batin kritis; yaitu menantang pesan-pesan negatif dari suara batin kritis. Ketika pustakawan dipandang tidak setara dengan profesi lain, tidak menjadikan pustakawan rendah diri tetapi berusaha untuk membantah dengan meyakini bahwa profesi pustakawan sangat diperlukan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Praktek *self-compassion*; dengan melatih diri untuk kasih sayang artinya memberlakukan diri dengan empati yang sama ditunjukkan pada orang lain. Pustakawan berusaha untuk mengevaluasi diri sendiri dan menghargai diri sendiri dan profesinya seperti menghargai profesi yang lain.
- c. Mendapatkan bantuan dari orang lain. Pustakawan rela mendapatkan bantuan orang lain atau profesi lain

ketika tidak mampu melakukan sendiri. Kerjasama adalah kata kunci yang kuat dalam membentuk penghargaan terhadap diri sendiri.

Peningkatan kompetensi menjadi mutlak dilakukan pustakawan untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. baik kompetensi profesional maupun individual. Indonesia pada era MEA terjadi persaingan bebas antar SDM di sepuluh negara ASEAN. Pustakawan harus memiliki *intrapreneurship*, mempunyai *soft skill* dan *hard skill* tinggi untuk berkompetisi dengan mengikuti sertifikasi pustakawan dan membangun jejaring pustakawan, ada beberapa strategi diantaranya dengan meningkatkan kompetensi profesional, pribadi, dan inti/umum, serta kerjasama antar pustakawan se-ASEAN.

Tahun 2016 Indonesia dan 189 negara lain di dunia berkomitmen dalam Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai kelanjutan dari MDGs yang sudah selesai tahun 2015. Pustakawan dapat terlibat dalam isu-isu strategis sehingga pustakawan dengan SDM mampu menjadi garda depan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran inklusifnya dengan menghargai dan menaruh rasa hormat terhadap profesinya, pustakawan mampu memberikan kontribusi yang dibutuhkan masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan baik miskin secara fisik maupun miskin informasi. IPI Kabupaten Gunungkidul, DIY sebagai organisasi profesi pustakawan bertujuan: 1) mengembangkan profesionalisme, kompetensi, wawasan kepustakawanan, dan peningkatan karir; 2) mengembangkan ilmu perpustakaan dan informasi; 3) mengabdikan dan mengamalkan tenaga keahlian pustakawan untuk bangsa dan negara; 4) memajukan dan memberikan perlindungan profesi kepada anggota, tercantum pada AD/ART IPI Periode 2015-2018 maka IPI Kabupaten Gunungkidul melakukan terobosan untuk meningkatkan *self-confidence* anggota dan organisasinya sekaligus meningkatkan *self-esteem* dan *self-respect* menginisiasi kerjasama dengan organisasi profesi lain, dengan mengundang Ketua PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kabupaten Gunungkidul dan Forum Arsiparis Kabupaten Gunungkidul dalam kegiatan seminar perpustakaan, 13 Oktober 2015 dihadiri 200 orang pustakawan, pengelola perpustakaan instansi, desa, sekolah, perguruan tinggi, tempat ibadah, komunitas, mahasiswa perpustakaan dan pemerhati perpustakaan di Gunungkidul.

IPI Kabupaten Gunungkidul mengumpulkan berbagai organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan forum lainnya untuk bekerja sama dalam setiap kegiatan yang dilakukan di organisasi tersebut. IPI Kabupaten Gunungkidul mengangkat ketua organisasi profesi sebagai anggota kehormatan IPI, agar dapat memberi dukungan dan penghargaan pada organisasi profesi khususnya pustakawan yang selama ini masih kurang dihargai. Strategi lain yang dilakukan IPI Kabupaten Gunungkidul dalam perekrutan anggota dengan membuka seluas-luasnya setiap orang yang bekerja di perpustakaan, pemerhati perpustakaan, dan mahasiswa perpustakaan menjadi anggota IPI Kabupaten Gunung kidul. Masa kepengurusan anggota IPI Kabupaten Gunungkidul Maret 2016 berjumlah 157 orang.

IPI Kabupaten Gunungkidul mendiversifikasi kegiatannya agar mampu bersaing dalam era persaingan bebas, membangun citra pustakawan di masyarakat. Menurut KBBI *on line* diversifikasi adalah penganekaragaman; penganekaan usaha untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan, produk, jasa, atau investasi. Diversifikasi diperlukan ketika posisi persaingan sangat kuat, pertumbuhan pasar cepat; posisi persaingan lemah, pertumbuhan pasar cepat; posisi persaingan sangat kuat, pertumbuhan lambat; dan posisi persaingan lemah, pertumbuhan lemah. Penganeka ragam kegiatan IPI Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tahun 2017 adalah:

- a. Membuka klinik konsultasi kepustakawanan. bekerjasama dengan KPAD Kabupaten Gunungkidul. Petugas klinik adalah pustakawan dari berbagai instansi baik KPAD Kabupaten Gunungkidul maupun sekolah di Sekretariat IPI Kabupaten Gunungkidul dengan jadwal layanan yang sudah ditetapkan;
- b. Membentuk kelas berbagi, IPI Gunungkidul bekerjasama dengan berbagai organisasi profesi dan forum non formal lainnya sifatnya sosial, seperti kelas berbagi penulisan, fotografi, teknologi informasi dan komunikasi, agar pustakawan memiliki kemampuan sehingga mampu berdaya guna dan bersaing dalam era perdagangan bebas ASEAN atau MEA;
- c. Membuat sayap-sayap organisasi IPI; sayap organisasi mengadaptasi dari partai politik, sayap menjadi kekuatan dalam menjaga organisasi induknya. IPI Gunungkidul bulan April 2016 membuat sayap Komunitas TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) sebagai hasil dari kegiatan *Workshop*

SLiMS. Pengurusnya dipilih dari peserta *workshop* yang memiliki kemampuan dalam bidang TIK dan diharapkan nantinya lebih fokus di bidangnya. Pengurus IPI induk dapat melakukan diversifikasi kegiatan yang lainnya. Direncanakan tahun ini akan dibuka sayap komunitas penulisan, dan sayap komunitas fotografi;

- d. Membentuk grup di sosial media untuk mempromosikan profesi pustakawan lewat *facebook* dan *whatsapp*.

### Eksternal

Selain internal kegiatan diversifikasi IPI Gunungkidul juga dilakukan secara eksternal, diantaranya:

- a. Turut aktif mengintervensi kebijakan yang sifatnya kemaslahatan masyarakat dan profesi. Dalam Laporan TemuKerjaPustakawanMadya dan PustakawanUtama Se-Indonesia Tahun 2005 Sungkono mencontohkan bagaimana Asosiasi Perpustakaan Irlandia berhasil mengintervensi proses pemilihan umum tahun 1997, dengan memberikan *briefing* kepada para kandidat agar mereka peduli kepada perpustakaan. Program ini dikatakan sebagai "*bring the libraries to the attention of politicians and other opinion-formers*". Pustakawan Indonesia lewat organisasi IPI patut mencontoh gerakan tersebut dengan mengadvokasi dan melobi para pengambil kebijakan, *stake holder*, baik eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu diperlukan kemampuan khusus pustakawan dengan berbagai pelatihan manajemen perpustakaan dan advokasi.
- b. Aktif mencari dukungan kerjasama dengan berbagai pihak, untuk mengembangkan perpustakaan dan pustakawan, kerjasama antar organisasi profesi, perusahaan, dan lain sebagainya. KPAD Kabupaten Gunungkidul melakukan kerjasama dengan *Coca Cola Foundation* Indonesia (CCFI), *Bill and Melinda Gates Foundation* (BMGF) mendukung pengembangan perpustakaan kabupaten dan desa yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Banyak perubahan terjadi di Gunungkidul sejak kerjasama menggunakan pendekatan *positive deviance* atau penyimpangan positif. *Positive deviance* sebuah pendekatan untuk menciptakan perubahan sosial dan perilaku, berdasarkan pengamatan bahwa di setiap masyarakat terdapat individu/institusi memiliki perilaku yang tidak umum/biasa, mereka menemukan solusi lebih baik dibanding individu/institusi lain yang mengalami masalah yang sama.

(*Coca Cola Foundation* Indonesia, 2014). Hal ini diaplikasikan untuk masalah yang berhubungan dengan kesehatan seperti kekurangan gizi, kesehatan reproduksi, penyebaran HIV/AIDS, dan sebagainya. Strategi inilah yang diadopsi oleh IPI walaupun tidak mutlak untuk memajukan profesi pustakawan. Hal yang menyimpang tetapi berdampak positif bagi kemajuan profesi dan masyarakat di Gunungkidul, diantaranya petani di Desa Bendung, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul sebelumnya buta teknologi informasi dan komunikasi sekarang dapat meningkatkan hasil produksinya berkat membaca buku dan *searching* informasi di internet. Kemampuan mengakses internet merupakan hasil pembelajaran TIK yang dibimbing oleh fasilitator PerpuSeru di Perpustakaan Desa "Ngupoyo Pinter". Petani sebelumnya tidak pernah ke perpustakaan menjadi akrab dengan perpustakaan desa. Contoh lain ibu-ibu yang tidak mempunyai pekerjaan di desa Bedoyo, Ponjong setelah diadvokasi untuk membaca di perpustakaan, kemudian belajar komputer dasar dan internet dan dilakukan pembelajaran membuat batik di perpustakaan desa, hasilnya mereka dapat membuat batik, bahkan di desa Kepek, Kecamatan Wonosari, ibu-ibu rumah tangga berhasil menjual batiknya secara *online* sampai ke California, USA setelah mendapatkan pelatihan *marketing online* di KPAD Kabupaten Gunungkidul.

- c. Aktif mengadvokasi masyarakat melalui penyuluhan ke RT, RW, desa, dan berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya seperti karang taruna, kelompok tani, kelompok sadar wisata, dan sebagainya yang tidak berhubungan langsung dengan profesi pustakawan. Pustakawan dapat menyelipkan pesan dan misi perpustakaan dalam kegiatan tersebut. Pustakawan juga berupaya untuk menjadi pengurus baik di tingkat RT, maupun organisasi lainnya.
- d. Melakukan pekerjaan sosial kemasyarakatan dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.

### Penutup

Menjadi seorang pustakawan profesional yang mampu melayani masyarakat tidak dapat dibentuk dengan sekejap, tetapi membutuhkan waktu dan pengalaman. Tidak ada salahnya dimulai dari sekarang pustakawan menjadi mediator dan fasilitator profesional mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakat, mampu memberikan solusi dalam setiap masalah di masyarakat,

diharapkan profesi pustakawan akan menjadi profesi yang dihargai dan menjadi harapan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pustakawan dituntut aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan profesinya, pada dasarnya profesi itu didedikasikan untuk mengembangkan kepustakawanan dalam masyarakat. Membuat perubahan adalah keniscayaan dalam era keterbukaan dan persaingan bebas, berdampak pada diharganya posisi pustakawan

sebagai sebuah profesi yang terhormat. Seperti ajaran kepemimpinan Ki Hajar Dewantara maka pustakawan menjadi sentral kegiatan dengan bertindak sebagai pustakawan yang *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*. Ketika menjadi pemimpin harus mampu memberikan contoh bagi orang-di sekitarnya, ketika ditengah kesibukannya pustakawan harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat, dan ketika dibelakang mampu memberikan dorongan dan mengarahkan untuk hidup yang lebih baik.

---

## Daftar Pustaka

---

- Awcock, Frances. 1996. *Re-asserting the Public Libraries Roles in influencing Culture and Citizenship*. Brisbane: Griffith University  
*Cambridge Advanced Learner's Dictionary third edition*. Inggris: Cambridge University Press. 2008
- Coca-Cola Foundation Indonesia-Perpuseru Project. 2014. *Positive Deviance (Penyimpangan Positif): Sebuah Pendekatan untuk Mengidentifikasi Strategi Sukses Pengembangan Perpustakaan*. Jakarta: Coca-Cola Foundation Indonesia – Perpuseru Project
- Depdiknas. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa  
<https://www.id.wikipedia.org/wiki/masyarakat>
- Ikatan Pustakawan Indonesia. *AD/ART Ikatan Pustakawan Indonesia Periode 2015-2018*. Jakarta: IPI
- Joyomartono, Mulyono. 1991. *Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat dalam Pembangunan*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Kongres IV Ikatan Pustakawan Indonesia, Ujung Pandang 22 - 24 September 1986. Jakarta: PB IPI
- Laporan Temu Kerja Pustakawan Madya dan Pustakawan Utama se-Indonesia 29-31 Agustus 2005. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI
- Lasa. 2007. *Manajemen Perpustakaan Sekolah*. Yogyakarta: Pinus
- \_\_\_\_\_. 2009. *Kamus Kepustakawanan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher
- Mahfud, Choirul. 2006. *Pendidikan Multi Kultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mobray, Kaplan. 2009. *The 10Ks of Personal Branding: Create a Better You* (paperback). United States of America: iUniverse
- Montoya, Peter Inc. *Personal Branding Information*. © 2003-2006 Peter Montoya, Inc., All Rights Reserved
- Montoya, Peter., & Vandehey. 2008. *The Brand Called You: Make Your Business Stand Out in a Crowded marketplace* (paperback). United States of America: McGraw-Hill
- Perpustakaan Nasional RI. 1999. *Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI
- Purwanto, Hari. 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Putra, Andi Madya. *Krisis Minat Baca Indonesia dalam Masalah*. Tersedia di on-line pada [http://www.kompasiana.com/andimadyaputra/krisis-minat-baca-indonesia-dalam-masalah\\_5535a3d66ea8342512da42d2](http://www.kompasiana.com/andimadyaputra/krisis-minat-baca-indonesia-dalam-masalah_5535a3d66ea8342512da42d2). Diakses pada 13 Mei 2016, pukul 17.00
- Santoso, Wartini. 2010. *Kelompok Tenaga Fungsional Pustakawan Perpustakaan Nasional RI "Antara Ada dan Tiada"*. Orasi Pustakawan Utama. Jakarta: Perpustakaan RI
- Santrock, J.W. 2011. *Life Span Development (13<sup>th</sup>ed.)*. New York: McGraw-Hill
- Soemirat, Sholeh dan Elvinaro Ardianto. 2010. *Dasar-dasar Public Relations*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Sulistyo-Basuki. 1993. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sutarno NS. 2006. *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta: Sagung Seto
- Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- Wirawan.1988. *Profesi Kepustakawanan: Suatu Analisa*. Makalah Hasil Kongres IV Ikatan Pustakawan Indonesia, Ujung Pandang 22-24 September 1986. Jakarta: PB IPI